

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian suatu negara tidak terlepas dari peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peran penting dan krusial. Tujuan UMKM menurut (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM yang ada di Indonesia sendiri memiliki kontribusi atau peranan cukup besar dalam perluasan dan penyerapan tenaga kerja baru, terbentuknya Produk Domestik Bruto (PDB) dan jaring pengaman usaha bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara maupun daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru. Jumlah UMKM yang sangat besar telah memberikan dampak positif untuk perekonomian Indonesia. UMKM sendiri menjadi pilar penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu negara, yang menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja dengan angka terbanyak. Namun, rendahnya pemahaman atas konsep dan produk layanan

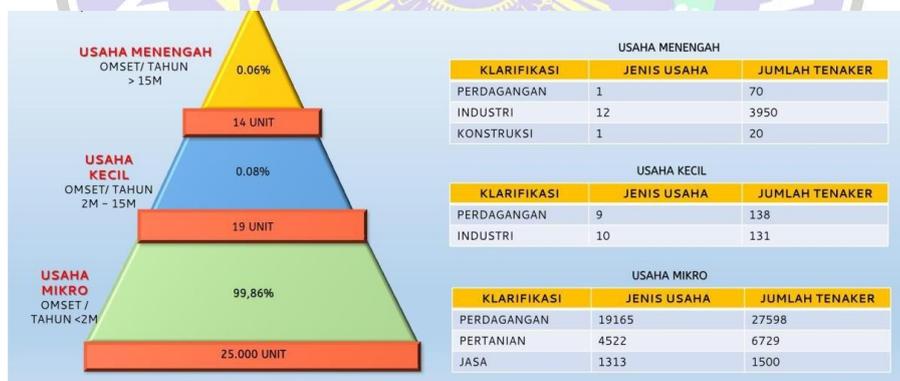
jasa keuangan, menjadikan Sebagian besar UMKM belum mampu mengelola usahanya dengan baik. Sehingga tidak jarang pula UMKM yang gagal dalam usahanya Free(2017). Kegagalan tersebut menyebabkan banyaknya permasalahan yang menghambat kinerja UMKM.

UMKM sering mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, karena disebabkan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Sehingga, perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan kinerja UMKM Muniroh (2019). Kinerja merupakan ukuran keberhasilan sebuah entitas usaha dalam mencapai tujuan strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi Abidoun(2015). UMKM harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan secara efektif dalam menjalankan suatu usahanya, sehingga itu literasi keuangan sangat penting bagi setiap pengusaha. Menurut Fahmi (2017), literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki tersebut dalam rangka membuat keputusan yang efektif. Literasi keuangan menjadi isu yang menarik baik di negara maju maupun negara berkembang dan telah memunculkan perubahan yang cepat dalam industri keuangan Wachira & Kihiu (2012), Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang mempengaruhi kesejahteraannya Lusardi (2009).

Literasi keuangan telah terbukti sangat penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, akurasi dan akuntabilitas yang dihasilkan dalam perusahaan. Keberhasilan atau kegagalan UMKM bergantung pada kelayakan finansial. Permasalahan yang sering dihadapi dan dialami adalah kurangnya pemahaman literasi keuangan dan inklusi keuangan. Menurut Alamsyah (2015) inklusi keuangan adalah bentuk strategi nasional keuangan inklusif yaitu hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabat.

Center for Financial Inclusion (2013) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi dan pembayaran, terjadinya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Menurut Survey Nasional Literasi dan Inklusi keuangan tahun 2013, literasi keuangan masyarakat akan diikuti dengan inklusi keuangan masyarakatnya. Masyarakat yang telah mengetahui lembaga jasa keuangan, terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan perlu didukung dengan ketersediaan akses kepada lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki korelasi yang erat dalam pemberdayaan konsumen. Korelasi ini memiliki hubungan yang berbanding lurus atas peningkatan kemampuan dan pemahaman seseorang dalam menentukan layanan jasa atau produk keuangan.

Salah satu hal yang dapat mengatasi berbagai penyebab rendahnya literasi keuangan yaitu dengan inklusi keuangan yang berguna untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan strategi Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017) yang telah memiliki satu pilar tentang edukasi keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan. Inklusi Keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada (Muniroh, 2019). Inklusi keuangan menjadi upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sebagai penyelenggara usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga, UMKM dapat membantu mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia



Gambar 1.1
Populasi UMKM Kabupaten Pacitan

Sumber : Dinas Perdakum Kabupaten Pacitan (2021)

Berdasarkan data dari Dinas Perdakum Kabupaten Pacitan tahun 2021 padagambar 1.1 melaporkan bahwa usaha mikro memiliki menghasilkan omset sebesar < Rp 2 Miliar per tahun, usaha kecil dengan omset Rp 2 Miliar – 15 Miliar per tahun, dan usaha menengah menghasilkan omset > Rp 15 Miliar per tahun, yang artinya bahwa keseluruhan UMKM memilki tingkat pendapatan >17 Miliar per tahun. Besarnya tingkat pendapatan tersebut akan memberikan dampak positif bagiperekonomian di Indonesia serta dapat mengurangi jumlah pengangguran yang adadi Indonesia.

Perkembangan UMKM juga mengharuskan pelaku UMKM untuk siap dalam persaingan dengan UMKM lainnya. Hal ini agar pelaku UMKM menciptakan usaha baru dan berbeda selain itu UMKM juga diharapkan memiliki kinerja yang bagus. Meskipun UMKM mempunyai peran yang potensial namun dalam kenyataannya masih banyak masalah yang dihadapi dalam perkembangannya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM saat ini adalah masalah dengan manajemen bisnis. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada beberapa sampel penelitian yang meliputi sampel bidang jasa, dagang, dan produksi, menunjukkan bahwa pemilik UMKM tidak memperhatikan pengelolaan keuangan usahanya. Sehingga sering terjadi kekurangan biaya untuk operasional jika ingin menambah produksi yang lebih variatif. Hal tersebut membuat pemilik UMKM terpaksa harus menggunakan uang pribadi untuk biaya produksi, meminjam uang dari lembaga keuangan atau memilih untuk tidak menambah produksi. Kebanyakan dari mereka tidak begitu mengetahui tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan. Terbukti dengan salah satu jawaban dari responden bahwa mereka tidak berhati-hati dalam

pengambilan kredit. Hal ini berarti tingkat literasi keuangan mereka masih sangat rendah. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang tingkat literasi dan inklusi keuangan membuat mereka sulit untuk dapat mengembangkan usahanya. Menurut Abor dan Quartey (2010), UMKM sering mengalami keterlambatan dalam perkembangannya, hal ini disebabkan berbagai masalah konvensional yang tidak terselesaikan secara tuntas seperti masalah kapasitas sumber daya manusia, kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, perlu adanya upaya strategis untuk meningkatkan kinerja UMKMAribawa (2016).

Kinerja merupakan ukuran keberhasilan sebuah entitas usaha dalam mencapai tujuannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Namun kinerja UMKM di Indonesia masih cenderung di bawah negara tetangga. Sanistasya (2019) dalam laporan *Global Entrepreneurship Monitor (GEM)* pada tahun 2016, menyatakan bahwa motivasi dalam penciptaan usaha dan kemampuan pelaku usaha jika dilihat dari tahapan kewirausahaan sebanyak 31 persen pelaku usaha kecil dewasa (18-64 tahun) memiliki niat untuk memulai bisnis dalam tiga tahun kedepan, 4 persen telah mendirikan bisnis, 10 persen menjalankan bisnis antara 3 sampai 42 bulan dan 12 persen telah memiliki dan mengelola lebih dari 42 bulan. Namun besarnya motivasi pelaku usaha terutama di daerah tidak sebanding dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Karena pelaku usaha kerap menghadapi beberapa masalah seperti persaingan bisnis, akses pembiayaan, infrastruktur, pemasaran dan teknologi (Sanistasya, 2019). Dalam menjalankan suatu usaha, seseorang harus

memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang keuangan untuk mengelola keuangan secara efektif, karena itu literasi keuangan sangat penting bagi setiap pengusaha.

Center for Financial Inclusion (2013), mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi dan pembayaran, terjadinya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dengan memperhatikan perlindungan konsumen serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang. Menurut Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017), literasi keuangan masyarakat akan diikuti dengan inklusi keuangan masyarakatnya. Masyarakat yang telah mengetahui lembaga jasa keuangan, terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan perlu didukung dengan ketersediaan akses kepada lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan tahun 2017 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan masyarakat Indonesia pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 59,7 persen menjadi 67,8 persen di tahun 2016.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terdapat hambatan dalam mengakses lembaga keuangan yang *unbankable* (tidak memenuhi persyaratan pinjaman bank) yang disebabkan oleh kesenjangan kemiskinan, rendahnya pembiayaan UMKM, tingginya suku bunga kredit mikro, kurangnya kemampuan manajemen UMKM dan terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan. Menurut Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Sukarela

Batunaggar mengatakan bahwa inklusi keuangan masih tergolong rendah hanya 60 persen penduduk dewasa yang memiliki rekening bank, terlebih lagi jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak (Hikam, 2019). Tingginya masyarakat yang tidak mendapatkan layanan jasa keuangan di Indonesia menurut survey yang dilakukan oleh *World Bank* pada tahun 2015 dapat dilihat dari dua sisi yaitu permintaan dan penawaran, dimana dari sisi penawaran terdapat beberapa faktor yang menghambat layanan keuangan untuk masyarakat antara lain adanya informasi asimetris yang menyebabkan institusi keuangan terlalu selektif dalam memilih nasabah, pendirian kantor cabang yang cenderung mahal, persepsi terhadap ibu rumah tangga yang memiliki pendapatan rendah sehingga tidak mempunyai akses terhadap jasa keuangan, proses pendirian yang berbentur birokrasi, formalitas yang tinggi dan masalah yang kompleks, pandangan terhadap nasabah golongan rendah yang dianggap tidak menguntungkan, perlunya dukungan dari sistem IT seperti memperluas jaringan komunikasi (Sanistasya, 2019).

Salah satu hal yang dapat mengatasi berbagai penyebab rendahnya literasi keuangan yaitu dengan inklusi keuangan yang berguna untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan strategi Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2017 yang telah memiliki satu pilar tentang edukasi keuangan untuk mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan (2016). Inklusi keuangan menjadi upaya untuk mendorong sistem keuangan agar dapat diakses seluruh lapisan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Sehingga, UMKM dapat membantu mengatasi kemiskinan yang ada di

Indonesia. Inklusi Keuangan bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dengan didukung oleh infrastruktur yang ada Muniroh (2019).

Selain literasi keuangan dan inklusi keuangan, pengelolaan juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu UMKM. Menurut Purba et al., (2021:114) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar (2019:5) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Di Pacitan tingkat literasi, inklusi keuangan dan pengelolaan keuangannya masih tergolong rendah oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka peneliti memilih judul penelitian **“Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Umkm Di Pacitan”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan di dalam penelitian ini diantaranya :

1. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Pacitan?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Pacitan?
3. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Pacitan?

4. Apakah inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Pacitan

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh inklusi keuangan secara parsial terhadap kinerja UMKM di Pacitan.
2. Pengaruh literasi keuangan secara parsial terhadap kinerja UMKM di Pacitan.
3. Pengaruh pengelolaan keuangan secara parsial terhadap kinerja UMKM di Pacitan.
4. Pengaruh inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM di Pacitan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1 Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Sebagai tambahan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan akademisi.

1.4.2 Bagi UMKM di Pacitan

Dapat dijadikan referensi dan kontribusi pemikiran dalam acuan untuk menyempurnakan kinerja yang sesuai dengan kebutuhannya dan untuk strategi optimalisasi yang tepat untuk meningkatkan kinerja UMKM.

1.4.3 Bagi Mahasiswa

Dapat menambah pengetahuan serta membandingkan teori dan praktik mengenai pentingnya pengaruh inklusi keuangan, literasi keuangan, dan

pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM.

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharap dapat dijadikan bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan UMKM khususnya tentang hal – hal yang berkaitan dengan peningkatkan kinerja UMKM di Pacitan .

